



## Tiap Paslon Dikawal Lima Personel Terlatih



**TALK SHOW :** Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono talk show bersama pengamat komunikasi Triono Lukmanto dan Pemred Koran Pagi Wawasan Aulia Muhammad di tengah deklarasi damai menyambut pilkada di Vina House, Selasa (13/2). Atas. Para wartawan Jateng deklarasi damai. ■ Foto : Danny Adriadhi Utama.

**SEMARANG** - Aparat Polda Jateng siap menugaskan 20 personel untuk pengawalan pribadi para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilgub 2018.

Penugasan pengawalan tersebut akan diserahkan usai pengambilan nomor urut Paslon oleh KPU Jateng, Selasa (13/02) malam.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan puluhan personel yang ditugaskan, kata Condro, terlatih tersebut memiliki berbagai kecakapan seperti kemampuan beladiri, kecakapan mengendarai kendaraan bermotor dan keterampilan menembak reaktif.

"Setiap lima personel, terdapat seorang perwira yang menjadi koordinator. Masing-masing mereka akan bertugas selama satu kali 24 jam," kata Condro Kirono.

Para personel kepolisian tersebut merupakan petugas terpilih yang akan melakukan pengawalan 24 jam. "Nanti malam, usai kegiatan pengambilan nomor

urut, akan diserahkan pengawal kepada calon gubernur dan wakil gubernur. Masing-masing lima personel," ungkapnya.

Sementara itu, dalam kegiatan Deklarasi Pilkada Damai Wartawan Jawa Tengah, selain pembacaan deklarasi mendukung Pilkada serentak 2018 yang aman dan kondusif, digelar juga talk show dengan sejumlah narasumber.

Kapolda berharap, agar media bisa saling menjaga harmoni bersama demi terwujudnya Pilkada yang aman, damai dan berkualitas.

"Kami berharap kepada Media, berita-berita yang dimuat adalah berita yang menyejukan, saling menjaga harmoni bersama," ungkapnya.

Wartawan senior, Aulia Muhammad mengatakan, sepanjang wartawan melaksanakan

tugas dengan kode etiknya maka, tidak akan ada pelanggaran kerja. Sebab, wartawan dibekali dengan jurnalisme damai, dan deklarasi merupakan pembulatan tekad.

"Pada dasarnya media tidak memihak. Namun jika harus memihak maka memihak kepada masyarakat. Kebijakan berita, sikap media itu ada di editorial. Dan perlu diingat, karyawan Media bertanggung jawab kepada publik bukan pemilik medianya," ujar Pemred Wawasan ini.

Pengamat Komunikasi, Triono Lukmanto menambahkan, terkait Pilkada, media harus memuat keberadaan dua pihak, tidak boleh menyindir atau menjatuhkan salah satu lawan politik.

"Kampanye itu mengajak, persuasi, jadi, berita konflik itu biasa. Namun titik mana yang menunjukkan konflik, titik mana yang menunjukkan perbedaan dua pihak itu harus jelas. Masyarakat sekarang itu pintar, jika media memihak, pasti ditinggalkan," pungkash Triono. ■ M17—sn